

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, kesimpulan yang didapat adalah :

1. Terdapat perbedaan kemampuan keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yaitu menunjukkan penurunan saat sesudah otonomi daerah dibandingkan sebelum otonomi daerah, hal ini berdasarkan hasil perhitungan Indeks Peran (*share*) PAD, Indeks Pertumbuhan (*growth*) PAD dan Indeks Elastisitas PAD, serta Metode Kuadran dan Metode Indeks.
2. Terdapat perbedaan tipe pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Hanya Kabupaten Lampung Barat yang mengalami penurunan posisi dari Daerah Berkembang Cepat menjadi Daerah Relatif Tertinggal, sedangkan hanya Kabupaten Lampung Tengah yang mengalami peningkatan dari Daerah Relatif Tertinggal menjadi Daerah Maju dan Cepat serta Kota Bandarlampung dari Daerah Maju tetapi Tertekan menjadi Daerah Maju dan Cepat. Kabupaten Lampung Utara dari Daerah Relatif Tertinggal menjadi Daerah Maju tetapi Tertekan sedangkan Kabupaten Lampung Selatan tidak mengalami perubahan posisi di Daerah Relatif Tertinggal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil perhitungan dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau retribusi daerah. Intensifikasi pajak merupakan upaya mengefisienkan kembali potensi objek pajak, hal ini dapat dilakukan melalui dinas yang berwenang seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas atau mutu sumber daya manusia (SDM) seperti pegawai, pemanfaatan sarana prasarana lingkungan kerja ataupun peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat yang memadai, peningkatan administrasi pajak seperti penyempurnaan data potensi pajak dan struktur kerja yang jelas, penyempurnaan undang-undang pajak yang mengatur tentang pajak dan retribusi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tanpa membuat masyarakat terbebani akan peraturan tersebut serta kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dengan masyarakat maupun instansi lain. Sedangkan ekstensifikasi pajak merupakan upaya memperluas objek dan subjek pajak yang dapat dijadikan potensi penerimaan daerah. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung adalah menggali potensi penerimaan untuk menarik investor ke Provinsi Lampung. Letak Provinsi Lampung yang strategis karena merupakan pintu mobilitas antara Pulau Sumatera dari Pulau Jawa disertai sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten/Kota Provinsi Lampung mulai dari sektor pariwisata (eksplorasi laut, gunung, hewan, dan tumbuhan), pertanian,

kehutanan, perkebunan, dan perikanan serta sektor budaya dan industri yang berpotensi untuk digali dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah berupa pajak oleh pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Penyebaran informasi, kemudahan birokrasi, serta peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seperti penyesuaian tarif pajak, proses pengawasan pungutan pajak, sanksi untuk wajib pajak maupaun petugas, penyempurnaan data untuk pengidentifikasian objek pajak baru, menciptakan peluang usaha yang baru untuk masyarakat sehingga timbul objek pajak yang baru, penerbitan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi dan pelayanan publik serta memaksimalkan penerimaan dari setiap transaksi ekonomi merupakan beberapa upaya ekstensifikasi pajak yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

2. Upaya peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap atau lambat akan mempengaruhi pendapatan daerah yang menjadi rendah. Kerja sama antar setiap Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dapat dilakukan yaitu di mana setiap Kabupaten/Kota Provinsi Lampung memiliki sektor unggulan tertentu atau komoditas khusus yang menunjang penerimaan daerahnya, sehingga kegiatan antar daerah akan beragam dan mendorong terciptanya kegiatan ekonomi antar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sehingga

eksternalitas positif yang timbul dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Selain itu pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung juga dapat melakukan upaya peningkatan peran dalam permodalan UMKM untuk mendorong usaha masyarakat dan menargetkan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, teknologi, budaya, birokrasi pemerintah yang bersih, infrastruktur, serta penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat terkait konflik yang sering terjadi antar daerah, juga harus dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam meningkatkan pertumbuhannya.

3. Upaya alokasi belanja yang efisien dan produktif dapat dilakukan atas inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung agar dapat memberikan *output*, *outcome*, dan *multiplier effect* yang nyata dirasakan dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat serta perlu adanya penerapan standar belanja dan pengawasan dalam rencana kerja anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
4. Adanya peran pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki daerah tersebut, seperti membantu pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung melakukan upaya khusus pada daerah yang relatif tertinggal atau berada di kemampuan keuangan yang rendah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya. Selain itu, dalam hal tranfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah, harus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

5. Penelitian ini hanya menganalisis 5 (lima) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung atau seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sehingga dapat lebih menggambarkan kesiapan daerah di seluruh Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan metode Indeks Kemampuan Keuangan dan Tipologi Klassen, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan daerah. Selain itu penelitian ini menggunakan rentang tahun yang berbeda saat sebelum dan sesudah otonomi, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyamakan rentang dan memperpanjang tahun penelitian sehingga hasil lebih menyeluruh. Penelitian ini hanya menganalisis PAD dan Belanja Daerah tidak menganalisa bagian struktur APBD yang lain, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisa setiap peran dalam struktur APBD. Penelitian ini hanya menganalisa keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tidak menganalisa masing-masing antar setiap Kabupaten/Kota Provinsi Lampung diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisa setiap Kabupaten/Kota Provinsi Lampung agar hasil penelitian lebih luas dan jelas.